

# **PERTIMBANGAN URGENSI PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BARU DI KALIMANTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

<sup>1</sup>Yahya Basysyar Verr Essalam

(Yahya.basysyar.2205166@students.um.ac.id)

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Sub tema : Geografi dan Lingkungan Hidup

## **ABSTRAK**

Lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ibu kota provinsi baru di Kalimantan akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan kaya akan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan laut. Namun, pembangunan ibu kota provinsi baru di Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya hutan, sumber daya alam yang penting untuk mengurangi gas rumah kaca dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan juga akan mempengaruhi lingkungan hidup melalui penggunaan bahan bakar fosil. Pembangunan ibu kota negara baru akan memerlukan banyak tenaga listrik, yang akan menghasilkan gas rumah kaca. Hal lain yang dapat terjadi akibat pembangunan IKN adalah peningkatan polusi. Pembangunan ibu kota negara baru akan memerlukan banyak air untuk membuat jalan, bangunan, dan fasilitas publik. Namun, penggunaan air akan menghasilkan limbah cair, yang dapat mengakibatkan polusi air. Untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah segera. Pemerintah harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggunakan tenaga terbarukan, seperti solar, angin, dan biomassa. Pemerintah harus mengurangi hilangnya hutan di Kalimantan dengan membuat program reforestasi. Pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan berbasis smart city mungkin mempunyai implikasi hukum dan dampak terhadap ekologi dan kesejahteraan sosial sehingga perlu adanya kajian dan evaluasi yang cermat. Memetakan permasalahan lingkungan di ibu kota Indonesia dapat membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Rencana zonasi ibu kota negara baru, menjaga kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial desa adat sekaligus mencegah urban sprawl.

*Kata Kunci : Ibu Kota Negara Baru, Dampak Lingkungan, Upaya Pencegahan.*

## **ABSTRACT**

*The environment is a very important factor in determining the welfare of society. The construction of a new national capital in Kalimantan will have a significant negative impact on the environment. Kalimantan is the largest island in Indonesia, which is rich in natural resources, such as forests, rivers and seas. However, the construction of a new national capital in Kalimantan will cause the loss of forests, which are a natural resource that is very important for reducing greenhouse gases and mitigating the impact of climate change. The construction of a new national capital in Kalimantan will also affect the environment through the use of fossil fuels. Building a new nation's capital will require a lot of electricity, which will produce greenhouse gases. Another thing that can happen as a result of IKN development is increased pollution. The construction of a new national capital will require a lot of water to create roads, buildings and public facilities. However, using water will produce liquid waste, which can result in water pollution. To reduce the negative impacts of building a new national capital in Kalimantan, the Indonesian government must take immediate steps. The government must reduce the use of fossil fuels and use renewable energy, such as solar, wind and biomass. The government must reduce forest loss in Kalimantan by creating a reforestation program. Moving the national capital to the island of Kalimantan based on a smart city may have legal implications and impacts on ecology and social welfare, so careful study and evaluation is needed. Mapping environmental problems in Indonesia's capital city can help ensure sustainable development and reduce environmental impacts. The zoning plan for the new national capital, maintains the environmental quality and social inclusiveness of traditional villages while preventing urban sprawl.*

*Keywords: New National Capital, Environmental Impact, Prevention Efforts.*

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun ibu kota negara baru di Kalimantan. Tetapi, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan akan memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan hidup, yang membutuhkan pertimbangan dan tindakan yang efektif.



Gambar 1. Pulau Kalimantan Secara Geografis

Secara geografis, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan kaya akan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan laut. Namun, pembangunan ibu kota provinsi baru di Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya hutan, sebagai sumber daya alam yang penting untuk mengurangi gas rumah kaca dan mitigasi dampak perubahan iklim. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk mengurangi erosi tanah dan mitigasi banjir.

Pembangunan ibu kota provinsi baru di Kalimantan juga akan berdampak terhadap lingkungan melalui penggunaan bahan bakar fosil. Pembangunan ibu kota negara baru akan memerlukan banyak tenaga listrik, yang akan menghasilkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, yang dapat mengakibatkan perubahan iklim dan mengakibatkan hujan lebih banyak atau hujan kurang. Hal lain yang dapat terjadi akibat pembangunan IKN adalah peningkatan polusi. Polusi adalah gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik. Polusi dapat mengakibatkan masalah kesehatan, seperti asma, demam pada anak-anak, dan asam lambung. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi lingkungan hidup melalui penggunaan air. Pembangunan ibu kota negara baru akan memerlukan banyak air untuk membuat jalan,

bangunan, dan fasilitas publik. Namun, penggunaan air akan menghasilkan limbah cair, yang dapat mengakibatkan polusi air.

Untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah segera. Pemerintah harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggunakan tenaga terbarukan, seperti solar, angin, dan biomassa. Pemerintah juga harus mengurangi penggunaan air dan mengurangi polusi.

Pemerintah harus mengurangi hilangnya hutan di Kalimantan dengan membuat program reforestasi dan mengurangi penggunaan hutan yang tidak diperlukan dan harus mengurangi penggunaan kayu yang tidak berasal dari sumber yang terdaftar.

Demikian hingga, dapat diketahui pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Namun, dengan langkah-langkah yang efektif, pemerintah Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan.

## UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF LINGKUNGAN HIDUP



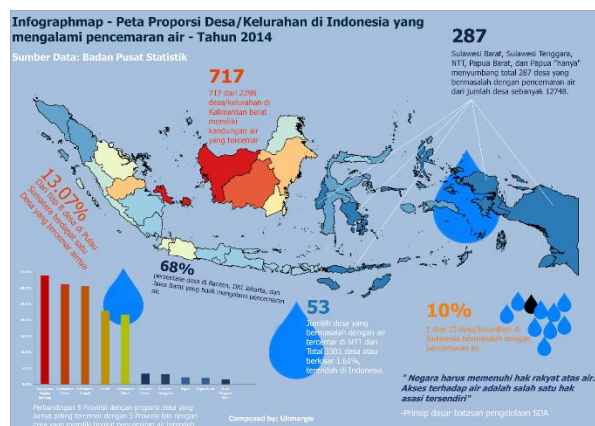
Gambar 2. Konsep *Smart City* IKN

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan berbasis *smart city* mungkin mempunyai implikasi hukum dan dampak terhadap ekologi dan kesejahteraan sosial. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur akan mengancam kelestarian lahan gambut dan bencana ekologi, sehingga perlu adanya kajian dan evaluasi yang cermat. Daerah penyangga ibu kota negara baru ini belum mengeluarkan kebijakan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun kebijakan lain seperti Kabupaten Penajam Paser Utara sudah ada. Memetakan permasalahan lingkungan di ibu kota

Indonesia dapat membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Rencana zonasi ibu kota negara baru, menjaga kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial desa adat sekaligus mencegah urban sprawl.

Kebijakan pemerintah ini memiliki implikasi hukum yang cukup kompleks. Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan memerlukan perubahan dalam hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk RTRW, yang akan mempengaruhi pengelolaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan pengangkutan. Perlu diingat bahwa pemindahan ibu kota akan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk pengangkutan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan sosial, kelestarian lahan, dan keseimbangan ekologi.

Perlu diingat bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan mengancam kelestarian lahan gambut dan bencana ekologi. Pemerintah harus melakukan kajian dan evaluasi yang cermat sebelum membuat kebijakan tersebut. Kajian ini harus mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kajian ini juga harus mencakup dampak terhadap keseimbangan ekologi, termasuk dampak terhadap ekosistem yang berhubungan dengan lahan gambut.



Gambar 3. Pemetaan Permasalahan lingkungan faktor pencemaran air tahun 2014

Memetakan permasalahan lingkungan di ibu kota Indonesia dapat membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Rencana zonasi ibu kota negara baru harus menjaga kualitas lingkungan dan inklusivitas sosial desa adat sekaligus mencegah urban sprawl. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mencakup pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan pengelolaan kebun hutan. Kebijakan ini juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang mengurangi keseimbangan ekologi, seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan pengangkutan.

## KESIMPULAN

Pembangunan ibu kota provinsi baru di Kalimantan akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan memerlukan pertimbangan serta tindakan yang efektif. Pembangunan menyebabkan hilangnya hutan, sumber daya alam yang penting untuk mengurangi gas rumah kaca dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pembangunan juga berdampak pada lingkungan melalui penggunaan bahan bakar fosil, yang menyebabkan gas rumah kaca dan polusi. Penggunaan air menghasilkan limbah cair yang dapat menyebabkan pencemaran air. Untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk: Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan energi terbarukan, mengurangi konsumsi dan polusi air, membuat program penghijauan dan mengurangi penggunaan hutan yang tidak perlu, mengurangi penggunaan limbah kayu, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carnawi, C., Hanif, S., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. AIP Conference Proceedings. <https://doi.org/10.1063/5.0110471>.
- Murjani, M., Sagama, S., & Saparuddin, M. (2022). Local Government Policies in Determination Development Impact Area Spatial Plan New Country Capital. Jurnal Hukum Volkgeist. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2274>.
- Pusung, P., Warouw, F., Rotty, V., & Giroth, L. (2023). Mapping environmental problems in the new capital city of “Nusantara” as a foundation for sustainable development governance. Environment and Social Psychology. <https://doi.org/10.54517/esp.v9i2.1808>.
- Ristanto, D., Jatayu, A., & Sihotang, R. (2022). Towards a sustainable new state capital (IKN): sustainable zoning plan formulation based on quantitative zoning approach. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1108. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012051>.
- T., Simanungkalit, F., & Sihombing, R. (2020). THE IMPACT OF INDONESIA CAPITAL RELOCATION TO KALIMANTAN PEATLAND RESTORATION. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2262>.

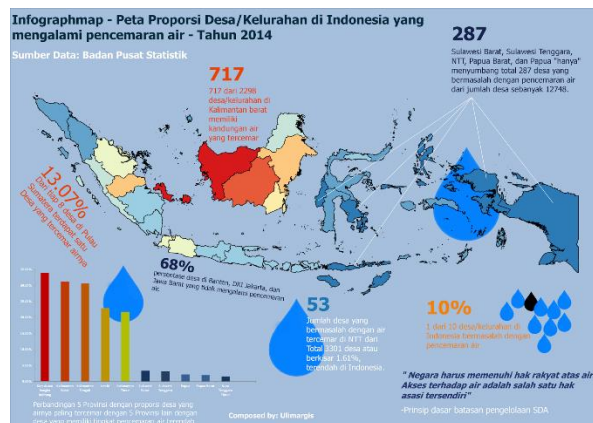
## LAMPIRAN



Lampiran 1. Pulau Kalimantan Secara Geografis



Lampiran 2. Konsep *Smart City* IKN



Lampiran 3. Pemetaan Permasalahan lingkungan faktor pencemaran air tahun 2014